

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup RTSM di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan

Ni Putu Ayu Mia Darmayanthi⁽¹⁾, Putu Nomy Yasintha⁽²⁾, Ni Wayan Supriliyani⁽³⁾
^(1,2,3)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: miadarmayanthi23@gmail.com⁽¹⁾, nomyyasintha.unud@gmail.com⁽²⁾, prily_baligilr@yahoo.com⁽³⁾

ABSTRACT

Program Keluarga Harapan (PKH) is a social protection program that provides cash assistance to Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) that aim to improve the quality of life of poor families by providing the governments the fields of education, health and social welfare as a form of social protection based on the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number: 42 / HUK / 2007. The results of this study indicate that all implementation indicators have been included in the implementation of Program Keluarga Harapan and can improve the quality of life of RTSM as evidenced by the PKH graduation but in implementation there are still obstacles, namely the PKH assistants or assistants who are less than the PKH recipients. This study resulted in recommendations for improving the implementation of family programs in the hope of improving the quality of life in Kediri District, Tabanan Regency.

Keywords: Implementation, Program Keluarga Harapan, RTSM Quality of Life

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan cerminan pembangunan suatu negara, untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, Pemerintah Indonesia membuat sebuah program penanggulangan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sejak tahun 2007. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin atau Keluarga Sangat Miskin (RTSM). Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan Program Keluarga Harapan di dua kabupaten di Bali.

Kabupaten Tabanan pada tahun 2012 merupakan kabupaten ketiga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan. Kabupaten Tabanan memiliki 10 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Kediri merupakan kecamatan yang memiliki jumlah keluarga penerima manfaat PKH paling banyak yang ada di Kabupaten Tabanan dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017. Kecamatan Kediri terdiri dari 15 desa dengan 6 pendamping PKH. Terdapat permasalahan dalam program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kediri yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap program keluarga harapan yakni adanya masalah yang ada di lapangan yaitu sulitnya mengubah *mindset* masyarakat untuk sadar ketika diminta dalam proses kelengkapan administrasi. Masyarakat penerima PKH atau yang disebut KPM (Keluarga Penemira Manfaat) lebih cepat merespon ketika uang bantuan PKH

turun atau masuk ke rekening KPM. Namun saat diminta untuk melengkapi data dan melakukan verifikasi dapat dikatakan sulit. Jadi dari pendamping sendiri yang terus aktif untuk meminta kelengkapan administrasi dari keluarga yang menerima bantuan PKH. Yang menyebabkan si pendamping terlambatan saat memverifikasi data dari si keluarga penerima bantuan PKH.

2. TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan semua aktivitas yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan pemecahan masalah di masyarakat dan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Menurut Carl Friedrich dalam Indiahono (2009:18) menjelaskan kebijakan publik merupakan tindakan orang, kelompok, maupun pemerintah untuk menyelesaikan segala hambatan tertentu serta mencari peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi Kebijakan

Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) mengatakan bahwa ada dua indikator utama dalam implementasi, yaitu kepatuhan (*compliance*) dan Apa yang terjadi (*What's happening?*). Kepatuhan yaitu apakah implementor dapat mematuhi prosedur atau aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan apa yang terjadi yaitu mempertanyakan bagaimana proses implementasi dilaksanakan, bagaimana hambatan yang datang, bagaimana keberhasilan dicapai dan mengapa? Terkait Implementasi PKH di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan berlangsung atau berjalan dengan menggunakan 5 indikator yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yaitu Banyaknya Aktor

yang Terlibat, Kejelasan Tujuan, Perkembangan dan Kerumitan Program, Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan, Faktor-Faktor Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi

LANDASAN KONSEPTUAL

Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup seluruh *system* sosial, politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan, infrastruktur, kelembagaan, budaya dan teknologi (Alexander 1994). Indikator keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat melalui 3 bidang yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial.

Kualitas Hidup

Kualitas hidup merupakan tolak ukur bagaimana kesejahteraan suatu Negara. Indikator kualitas hidup Menurut OECD (1982) yaitu pendapatan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, lingkungan, stabilitas sosial. Indikator tersebut dapat dikatakan sangat memenuhi, dalam artian sudah mencakup semua hal dan mencerminkan tolak ukur kualitas hidup.

Kemiskinan

Kemiskinan yaitu keadaan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau standar hidup masyarakat di suatu Negara. Kondisi tersebut dapat dilihat dari rendahnya kualitas hidup masyarakat, pendapatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan PKH secara teknik dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga

Sangat Miskin (RTSM). PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. PKH merupakan program bantuan bagi RTSM dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sejak tahun 2007. Tujuan dari PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM/ KSM). Penerima PKH memiliki kewajiban berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup RTSM di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan “ dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dari sumber data diperoleh dengan *snowball sampling* dan *purposive sampling* serta ditambah menggunakan Teknik Triangulasi dalam pengumpulan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kualitas Hidup RTSM di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan

Indikator Kepatuhan (*Compliance*)

Ripley menjabarkan indikator kepatuhan yaitu bertindak sesuai ketentuan dan mematuhi

peraturan yang telah digariskan di dalam kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat bagaimana tingkat kepatuhan tersebut dijalankan oleh implementor. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku dan pemahaman implementor itu sendiri sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Indikator kepatuhan yang dilihat dari perilaku dan pemahaman implementor terhadap kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan program yaitu pendoman umum PKH. Maka di dapat dilihat bahwa implementor dan KPM dari PKH di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan patuh terhadap petunjuk teknis program dalam mengimplementasikan program khususnya pendamping, dimana terlihat dari adanya tahapan-tahapan yang sudah dijalankan sesuai dengan aturan petunjuk teknis sehingga membuat keberhasilan dari implementasi PKH dalam meningkatkan kualitas hidup RTSM di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sudah tercapai yang dibuktikan dengan adanya Graduasi.

Indikator Apa Yang Terjadi (*What's Happening*)

Indikator Kedua yang mempengaruhi implementasi dalam model Ripley dan Franklin adalah Apa Yang Terjadi. Pendekatan ini menanyakan bagaimana implementasi berjalan. Apakah itu sedang diicipai? Keberhasilan implementasi ditandai lancarnya rutinitas fungsi dan masalah apa yang dihadapi. Terkait Implementasi PKH di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan berlangsung atau berjalan dengan menggunakan 5 indikator yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin.

Banyaknya Aktor yang Terlibat didalam proses implementasi suatu program tidak hanya melibatkan pemerintahan dan birokrat, tetapi juga melibatkan aktor di luar pemerintahan yaitu organisasi non pemerintah yaitu sebagai pihak yang berkepentingan. Dilihat dari jumlah dan identitas dapat diketahui bahwa dari segi latar belakang pendidikan dan jabatan dapat dikatakan bahwa implementor sudah sesuai dengan kebutuhan program namun dalam segi jumlah masih terjadi permasalahan yaitu pada segi jumlah pendamping yang hanya enam orang dengan luas Kecamatan Kediri sangat luas dan jumlah KPM nya paling banyak dari kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tabanan data terakhir yaitu sebesar 1845 KPM sehingga dirasa masih kurang memadai untuk melaksanakan dan memaksimalkan pendampingan. Sedangkan dari segi identitas petunjuk teknis program program telah mengatur sedemikian rinci tentang pembagian kerja antara implemendor yang satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Dalam memberikan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan KPM, pendamping setiap bulannya telah melaksanakannya bertujuan untuk perubahan perilaku dari KPM sendiri, sedangkan untuk indikator peran dari pihak yang berkepentingan, peran lembaga bayar (bank) masih kurang dalam mensukseskan program PKH ini, serta dalam hubungan hierarki antara implementor sudah berjalan dengan baik dari PPKH ke koordinator kabupaten, koordinator kabupaten dengan koordinator kecamatan dan koordinator kecamatan dengan para pendamping begitu juga sebaliknya.

Kejelasan Tujuan kebijakan berkaitan dengan bagaimana isi dan konteks kebijakan. Jelasnya isi suatu kebijakan akan mempermudah implementor dalam memahami dan mewujudkan kebijakan dalam suatu tindakan. Pada Program Keluarga Harapan ini peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program adalah keputusan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/HUK/2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).. Dalam pelaksanaannya peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup RTSM yaitu penerima manfaat PKH dengan memberikan bantuan non tunai. Petunjuk teknis program PKH telah memberikan instruksi dengan baik kepada implementor mengenai tujuan program dan tugas serta fungsi masing-masing implementor dalam proses implementasi dapat dilihat bahwa memang tujuan dari adanya program PKH ini sudah tercapai dan juga mendekati untuk mencapai tujuan tersebut, baik dari meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH yang sudah sangat terbantu dengan bantuan pendamping yang membantu para penerima manfaat PKH untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan, serta dari segi meningkatkan kondisi ekonomi peserta PKH para penerima manfaat mengaku kondisi ekonomi mereka semakin kesini semakin baik karena mereka sangat terbantu dengan program ini yang dulunya mereka membiayai perlengkapan sekolah anak mereka sekarang sudah dibantu oleh PKH dan menggunakan uang yang seharusnya untuk keperluan sekolah anak itu untuk kebutuhan yang lainnya.

Perkembangan dan Kerumitan Program menjelaskan bahwa kerumitan program dilihat dari sejauh mana pemerintah telah menyiapkan secara detil kelengkapan-kelengkapan program mulai dari aturan hingga sampai pada SOP dari program tersebut serta juga dapat dilihat dari kompleksnya pelaksanaan program/kebijakan. berkaitan dengan perkembangan dan kerumitan program, penulis menilai bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kediri ini sudah dipersiapkan dengan baik melalui adanya petunjuk teknis program yang mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh implementor di lapangan. Namun juga terdapat kendala dimana pada saat yang sama implementor menjalankan Program Keluarga Harapan, implementor juga menjalankan program-program lain sehingga mempengaruhi efektifitas dan hasil kinerja implementor itu sendiri dalam mensukseskan pelaksanaan program keluarga harapan.

Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan yaitu bagaimana besarnya dukungan dari publik terhadap penerimaan suatu program memberikan dampak positif bagi proses implementasi program. Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis partisipasi baik itu dukungan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan serta dukungan dari unit-unit lain didalam lingkup Dinas Sosial Kabupaten tabanan merupakan bentuk kerjasama untuk saling membantu menjalankan program yaitu dukungan pemerintah daerah disini menjadi salah satu bentuk bahwa pemerintah daerah ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tabanan khususnya di Kecamatan Kediri.

Faktor-Faktor Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi program tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang muncul selama proses implementasi. Pada dasarnya indikator ini menjelaskan mengenai apakah faktor penghambat yang terjadi selama proses implementasi suatu program . Faktor-faktor tersebut yaitu sulitnya komunikasi, tidak bisa membaca, menulis, berhitung sehingga dalam pengumpulan berkas administrasi PKH seperti KK, Foto copy transkrip buku tabungan BNI, KTP dll mengalami kendala dan faktor-faktor tersebut nantinya akan menghambat pengimplementasian PKH dalam meningkatkan kualitas hidup RTSM di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan ini adalah pelaksanaan PKH dalam Meningkatkan Kualiiitas Hidup RTSM di Keccamatan Kediri Kabupaten Tabanan telah berjalan dengan baik namun ada beberapa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan PKH di Kecamatan Kediri berdasarkan analisis teori Randal B. Riipley dan Grace A. Frankliin (1986) sebagai berikut :

1. Variabel *compliance* atau kepatuhan, dapat dilihat bahwa implementor sudah menjalankan ketentuan-ketentuan dalam pedoman umum pelaksanaan PKH, khususnya tim pendamping yang menjalankan tahapan-tahapan program sesuai dengan ketentuan kebijakan program. Kepatuhan ini terjadi karena pengetahuan dan pemahaman implementor tersebut mengenai program sudah cukup baik.

2. Variabel *what happening* yaitu yang mempengaruhi efektifnya pelaksanaan PKH di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ini ada beberapa hal, yaitu dilihat dari indikator *number and identity* adalah memang terbatasnya jumlah tim pendamping yang hanya berjumlah enam orang saja, dimana harus mendampingi 1845 penerima manfaat yang tersebar di kecamatan Kediri tetapi tidak mengganggu kinerja pendamping karena sudah membagi tugas dengan baik dan juga dengan membentuk kelompok penerima manfaat agar pendampingan yang diberikan pendamping dapat berjalan dengan baik. Dan dari segi indikator dengan Peran dari Pihak yang Berkepentingan, peran lembaga bayar (bank) masih kurang dalam mensukseskan program PKH ini, karena lembaga bayar (bank) ini yang bukan bagian dari instansi pemerintah bersifat kurang fleksibel, jadi koordinasi antara para pendamping dengan pihak bank sendiri agak sulit, beberapa pengaduan seperti kendala teknis seperti ATM terblokir, tertelan mesin ATM, dan nama serta alamat dari penerima manfaat yang tidak sesuai serta lambatnya peluncuran dana yang cukup lama direspon.
3. Ketiadaan Hirarki, garis hirarki baik implementor dengan implementor ataupun implementor dengan target group sudah jelas kemana harus berkomunikasi dan kemana harus bertanggungjawab. Kemudian untuk

indikator Perkembangan dan Kerumitan Program, dimana pada saat yang sama implementor menjalankan Program Keluarga Harapan, implementor juga menjalankan program-program lain sehingga mempengaruhi efektifitas dan hasil kinerja implementor itu sendiri dalam mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam hal Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan, pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Sosial Kabupaten Tabanan sudah memberikan bantuan untuk pelaksanaan program Pengaruh eksternal yang di luar kendali implementor. Faktor-Faktor Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi, juga sangat memberikan pengaruh terhadap kesuksesan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kediri ini dimana terdapat kendala teknis yaitu faktor- faktor sulitnya komunikasi, tidak bisa membaca, menulis, berhitung sehingga dalam pengumpulan berkas administrasi PKH seperti KK, Foto copy transkrip buku tabungan BNI, KTP dll mengalami kendala dan faktor- faktor tersebut nantinya akan menghambat pengimplementasian program keluarga harapan (PKH).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander. 1994. *Peran Pembangunan Infrastruktur*. Yogyakarta; Academic Press
- Ayu Lestari. 2014. *Transparansi Kebijakan Publik*. Bandung; Gava Media

- Darmadi, Hamadi. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung; Alfabeta
- Ginanjar Kartasasmita. 1994. *Konsep Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Morris. 1979. *Indeks Kualitas Hidup*. Jakarta; Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung; Alfabeta
- Ripley Randall. B, Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago-Illionis; Second Edition The Dorsery Press
- Satori, Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta
- Siagian P. Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta; Bumi Aksara
- Sajogyo. 2002. *Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press
- Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. Florida; Amazon
- Williamson, G. 2011. *Kualitas Hidup Manusia* (Diterjemahkan oleh S.G.N.D. Darmadja). Yogyakarta; Edisi ke-1. Gajah Mada University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jamin tentang Penetapan Perubahan Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen PKH

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/HUK/2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

Dokumen

Laporan Rekapitulasi Data dan Perkembangan Kegiatan PKH Kabupaten Tabanan tahun 2017

Pedoman Umum Program Keluarga Harapan 2016

Jurnal/ Karya Ilmiah

Ardianti. 2017. *Implementasi Program Keluarga Harapan dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang*. Available at <http://respository.umrah.ac.id/206/1/JURNAL.pdf>. Diakses pada 22 Oktober 2018

Carl Fredrich, 2009. *Teori Kebijakan Publik*. Universitas Siliwangi. Available at <https://www.scribs.com/document/95657724/-Teori-Kebijakan-Publik>. Diakses pada 22 Oktober 2018

Chung et al. 2015. *Implementation of Proverty Reduction Policies; An Analysis of National Trageted Program For Oriverty Reduction in the Nothwest Region of Vietnam*. Available at https://ijibssnet.com/journals/Vol_6_No_9_1_September_2015/8.pdf. Diakses pada 22 Oktober 2018

Cobbinah et al. 2013. Dynamics of Proverty in Developing Countries; Review of Proverty Reduction Approaches. Available at <https://www.researchhare.net/publication/255730787>. Diakses pada 22 Oktober 2018

Utomo, dkk. 2013. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)*. Available at <https://media.neliti.com/media/publication/76777-ID-pelaksanaan-program-keluarga-harapan-dal.pdf>. Diakses pada 22 Oktober 2018

Dokumen Elektronik

NusaBali.com. *Data Program Keluarga Harapan dituding Kacau*. 18 maret 2017. Available at <https://www.nusabali.com/berita/111727/data-program-keluarga-harapan-ditufing-kacau>. Diakses 22 Oktober 2018

